

PENGUMUMAN
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
TAHUN ANGGARAN 2009
Nomor : SEK.KP.02.01-23

Panitia Pengadaan CPNS Departemen Hukum dan HAM R.I. Tahun Anggaran 2009 menerima pendaftaran CPNS Taruna Akademi Ilmu Pemasaryakatan (AKIP), Taruna Akademi Imigrasi (AIM) dan Tenaga Teknis (Umum) di lingkungan Departemen Hukum dan HAM, yang akan dilaksanakan pada :

- Hari : Kamis s/d Sabtu
Tanggal : 1 s/d 3 Oktober 2009
Tempat : 1. Pendaftaran melalui website <http://www.depukumham.go.id> dan <http://e-cpns.depukumham.go.id> pada Unit kerja Pusat dimulai jam 08.00 WIB pada tanggal 1 Oktober 2009 s/d jam 24.00 WIB pada tanggal 3 Oktober 2009
2. Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM di seluruh Indonesia (bagi pendaftar CPNS Umum dan CPNS Taruna AKIP-AIM)

Adapun persyaratannya adalah sebagai berikut :

A. CPNS Taruna AKIP dan AIM

Jumlah Lowongan : **120** orang (AKIP : 60, AIM : 60)

a. Persyaratan Pelamar CPNS Taruna AKIP dan AIM

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pria/Wanita;
3. Pendidikan SMU/Madrasah Aliyah/ SMK (Bangunan, elektro, Mesin, Listrik, Otomotif, Komputer, pertanian, akunting, pariwisata, pelayaran), dengan nilai Ijazah terakhir rata-rata 6 (enam) dengan nilai Bahasa Inggris 7 (tujuh);
4. Umur pada tanggal 1 Desember 2009 serendah-rendahnya 18 tahun setinggi-tingginya 22 tahun (dibuktikan dengan Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir);
5. Tinggi minimal Pria 165 cm, Wanita 155 cm, berat badan seimbang (ideal) berdasarkan hasil pengukuran yang dilaksanakan pada saat pengambilan nomor ujian;
6. Berbadan sehat, tidak cacat, tidak berkacamata dan tidak buta warna dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter RS. Pemerintah/ Puskesmas;
7. Bebas HIV/AIDS, bebas narkoba, hepatitis dan paru-paru sehat dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dan Keterangan Hasil Rontgen (setelah dinyatakan lulus);
8. Tidak bertato;
9. Berkelakuan baik dengan bukti surat dari Kepolisian yang masih berlaku (Surat Keterangan Catatan Kepolisian);
10. Belum pernah menikah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah dan sanggup tidak menikah selama pendidikan;
11. Tidak terikat dengan Instansi lain, baik Pemerintah maupun Swasta;
12. Bersedia ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia ;
13. Sanggup mengganti biaya pendidikan apabila melanggar perjanjian Ikatan Dinas dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sekurang-kurangnya 5 tahun setelah tamat pendidikan terhitung di UPT, dengan membuat surat pernyataan dari orang tua / wali yang dilegalisir oleh Notaris setempat (diserahkan setelah diterima menjadi Taruna AKIP-AIM);

14. Seleksi ujian dilakukan dengan sistem gugur yang terdiri dari :
 - a. Ujian kesehatan dan kesamaptaan
 - b. Psikotest
 - c. Pengamatan Fisik dan Keterampilan
 - d. Ujian tertulis Tes Kemampuan Dasar (TKD)
15. Khusus penerimaan dari Pegawai Departemen Hukum dan HAM RI selain memiliki syarat tersebut di atas harus memenuhi syarat seperti :
 - a. CPNS / PNS di lingkungan Masyarakat dan Imigrasi Departemen Hukum dan HAM, belum pernah menikah dengan pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a), dibuktikan dengan surat pengantar dari Pejabat Eselon II;
 - b. Umur pada tanggal 1 Desember 2009 tidak lebih dari 25 tahun, yang dibuktikan dengan akte/surat keterangan lahir ;
 - c. Tidak terdapat catatan cela sesuai PP Nomor 30 Tahun 1980 dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pejabat Kepegawaian/Kepala UPT ;
16. Pelamar yang memenuhi syarat hanya diperbolehkan mengajukan satu lamaran pada salah satu Akademi saja ;

b. Kelengkapan berkas pendaftaran Calon Taruna AKIP-AIM :

Membuat surat lamaran yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI ditulis tangan dengan tinta hitam,bermaterai Rp.6000,- dengan melampirkan:

1. Fotocopy Ijazah terakhir dan Daftar Nilai yang dilegalisir serta foto copy Ijazah SD dan SMP tanpa legalisir;
2. Surat Keterangan Dokter RS. Pemerintah/Puskesmas;
3. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang telah dilegalisir;
4. Fotocopy Akta kelahiran/Kenal Lahir;
5. Surat Keterangan Belum Pernah Menikah yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa;
6. Surat Pernyataan dari Pelamar yang berisi pernyataan meliputi : sanggup tidak menikah selama pendidikan, tidak terikat dengan Instansi lain/swasta, bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia dan sanggup mengganti biaya pendidikan apabila melanggar perjanjian ikatan dinas;
7. Foto copy Kartu Kuning/Kartu Pencari Kerja yang telah dilegalisir;
8. Pas foto berwarna dasar merah berukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 2 lembar.

Untuk PNS Departemen Hukum dan HAM RI disamping butir di atas, juga harus dilengkapi dengan :

- Surat ijin/Pengantar dari Pejabat Pembina Kepegawaian ditingkat Pusat maupun daerah, atau Kepala UPT ;
- Fotocopy SK pangkat terakhir yang dilegalisir.

Berkas lamaran bagi calon Taruna AKIP dimasukkan dalam map warna **KUNING**, berkas lamaran bagi calon Taruna AIM dimasukkan dalam map warna **BIRU**, di luar map tertulis :

- Nama
- Tempat dan Tanggal Lahir
- Pendidikan
- Alamat Sekarang
- Nomor Telepon yang mudah dihubungi

B. PELAKSANAAN PENGADAAN CPNS UMUM (UNIT PUSAT)

1. Kualifikasi SLTA

Persyaratan :

- 1) Usia, pada tanggal 1 Desember 2009 sekurang-kurangnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 28 tahun.
- 2) Pendidikan : SMK (Listrik dan Mesin).
- 3) Berbadan sehat, tidak buta warna dan tidak bertato.
- 4) Tidak terikat dengan instansi lain (Pemerintah maupun swasta).
- 5) Tinggi dan berat badan
 - PRIA
Tinggi sekurang-kurangnya 160 cm dengan berat badan seimbang
 - WANITA
Tinggi sekurang-kurangnya 150 cm dengan berat badan seimbang
- 6) Diprioritaskan bagi yang memiliki sertifikat komputer atau keahlian khusus lainnya.
- 7) Berkas lamaran dimasukkan dalam map warna **MERAH**, di luar map tertulis :
 - Nama
 - Tempat dan Tanggal Lahir
 - Pendidikan
 - Alamat Sekarang
 - Nomor Telepon yang mudah dihubungi
- 8) Berkas lamaran terdiri dari :
 - Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas bermaterai Rp.6000,- ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI
 - Fotocopy Ijazah terakhir dan Daftar Nilai yang dilegalisir serta foto copy Ijazah SD dan SMP tanpa legalisir;
 - Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang telah dilegalisir;
 - Foto copy Kartu Kuning/Kartu Pencari Kerja yang telah dilegalisir;
 - Foto copy Akta kelahiran/Kenal Lahir;
 - Surat Pernyataan dengan dibubuhi materai Rp.6000,-:
 1. Tidak menuntut Penyesuaian Ijazah Sarjana selama 6 Tahun
 2. Tidak menuntut mutasi baik mutasi sebagai staf maupun mutasi ke UPT lain selama 10 Tahun terhitung sejak diangkat menjadi CPNS
 - Surat keterangan sehat dari dokter RS. Pemerintah/Puskesmas;
 - Pas Photo, berwarna berukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (untuk kartu ujian)
 - Foto copy sertifikat komputer dan sertifikat khusus lainnya.
- 9) Pelamar dapat diberikan nomor ujian bagi yang telah lulus seleksi administrasi.

2. Kualifikasi Sarjana Muda (DIII)

Persyaratan :

- a. Usia, pada tanggal 1 Desember 2009 sekurang-kurangnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 30 tahun.
- b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
 - Perguruan Tinggi Negeri Minimal : 2,50
 - Perguruan Tinggi Swasta Minimal : 2,75
- c. Berbadan sehat, tidak buta warna dan tidak bertato.
- d. Tidak terikat dengan instansi lain (Pemerintah maupun Swasta)
- e. Berkas lamaran dimasukkan dalam map warna **PUTIH**, di luar map tertulis :
 - Nama
 - Tempat dan Tanggal Lahir
 - Pendidikan
 - Alamat Sekarang
 - Nomor Telepon yang mudah dihubungi

- f. Berkas lamaran terdiri dari :
- Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas bermaterai Rp.6000,- ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI
 - Fotocopy Ijazah terakhir dan Transkrip Nilai yang dilegalisir serta foto copy Ijazah SD, SMP, dan SMA tanpa legalisir;
 - Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang telah dilegalisir;
 - Foto copy Kartu Kuning/Kartu Pencari Kerja yang telah dilegalisir;
 - Foto copy Akta kelahiran/Kenal Lahir;
 - Surat keterangan sehat dari dokter RS. Pemerintah/Puskesmas;
 - Pas Photo berwarna dasar merah berukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (untuk kartu ujian)

3. Kualifikasi Pendidikan Sarjana (S1)

Persyaratan :

- 1) Usia, pada tanggal 1 Desember 2009 sekurang-kurangnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun.
- 2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
 - Perguruan Tinggi Negeri Minimal : 2,50
 - Perguruan Tinggi Swasta Minimal : 2,75
- 3) Berbadan sehat, tidak buta warna dan tidak bertato
- 4) Tidak terikat dengan instansi lain (Pemerintah maupun Swasta)
- 5) Berkas lamaran dimasukkan dalam map warna **HIJAU**, di luar map tertulis
 - Nama
 - Tempat dan Tanggal Lahir
 - Pendidikan
 - Alamat Sekarang
 - Nomor Telepon yang mudah dihubungi
- 6) Berkas lamaran terdiri dari,
 - Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas bermaterai Rp.6000,- ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI;
 - Fotocopy Ijazah terakhir dan Transkrip Nilai yang dilegalisir serta foto copy Ijazah SD, SMP, dan SMA tanpa legalisir;
 - Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang telah dilegalisir;
 - Foto copy Kartu Kuning/Kartu Pencari Kerja yang telah dilegalisir;
 - Foto copy Akta kelahiran/Kenal Lahir;
 - Surat keterangan sehat dari dokter RS. Pemerintah/Puskesmas;
 - Pas Photo berwarna dasar merah berukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (untuk kartu ujian);

4. Tenaga Dokter (Dokter Umum dan Dokter Gigi) dan Widyaiswara (S2-Pendidikan)

Persyaratan :

- a. Usia, pada tanggal 1 Desember 2009 sekurang-kurangnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun
- b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
 - Perguruan Tinggi Negeri Minimal : 2,50
 - Perguruan Tinggi Swasta Minimal : 2,75
- c. Berbadan sehat, tidak buta warna dan tidak bertato
- d. Tidak terikat dengan instansi lain (Pemerintah atau Swasta)
- e. Berkas lamaran dimasukkan dalam map warna **COKLAT**, di luar map tertulis
 - Nama
 - Tempat dan Tanggal Lahir
 - Pendidikan
 - Alamat Sekarang
 - Nomor Telepon yang mudah dihubungi

- f. Berkas lamaran terdiri dari :
- Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas bermaterai Rp.6000,- ditujukan Kepada Menteri Hukum dan HAM RI;
 - Fotocopy Ijazah terakhir dan Transkrip Nilai yang dilegalisir serta foto copy Ijazah SD, SMP, SMA, dan S-1 tanpa legalisir;
 - Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang telah dilegalisir;
 - Foto copy Kartu Kuning/Kartu Pencari Kerja yang telah dilegalisir;
 - Foto copy Akta kelahiran/Kenal Lahir;
 - Surat keterangan sehat dari dokter RS. Pemerintah/Puskesmas;
 - Pas Photo berwarna dasar merah berukuran 3x4 sebanyak 2 lembar (untuk kartu ujian)

FORMASI UNIT PUSAT

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI
1	SEKRETARIAT JENDERAL		
	JUMLAH		191
	Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum	S1. Ilmu Hukum	3
	Penyusun Abstraksi Hukum	S1. Ilmu Hukum	3
	Penyusun Rencana Pengembangan dan Pembinaan	S1 Ekonomi Manajemen	3
	Penyusun Bahan Kerjasama Teknik Luar Negeri	S1. Hubungan Internasional	2
	Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program	S1. Ekonomi Manajemen	3
	Penyusun Bahan Evaluasi dan Laporan	S1. Akuntansi	2
	Pemroses Mutasi Kepegawaian	S1. Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia	4
	Verifikator Keuangan	S1. Akuntansi	2
	Penata Laporan Keuangan	S1. Akuntansi	2
	Pranata Komputer	S1. Teknik Komputer	9
	Pengelola Administrasi	S1. Administrasi Negara	3
	Penyuluh/pembina Mental pegawai	S1. Agama Islam Syariah	3
	Dokter Umum	Dokter Umum	3
	Pembimbing Mental Pegawai	S1. Psikologi	4
	Operator Komputer	DIII Teknik Komputer	5
	Perawat Gigi	DIII Perawat gigi	2
	Analisis Kesehatan	DIII Analisis Kesehatan	2
	Agendaris	DIII Adm Perkantoran, Sekretaris	6
	Pengadministrasi Umum	DIII Adm Perkantoran, Sekretaris	6
	Teknisi Listrik	SMK Listrik	4
	Taruna AKIP/AIM	SMU/Madrasah Aliyah/ SMK	120
		(Bangunan, elektro,Mesin, Listrik,	
		Otomotif, Komputer, pertanian,	
		akunting, pariwisata, pelayaran)	
2	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN HAM		
	JUMLAH		39
	Widyaiswara	S2. Pendidikan	1
	Penyusun Bahan Kerjasama Teknik Luar Negeri	S1. Hubungan Internasional	2
	Penyusun Abstraksi Hukum	S1. Ilmu Hukum	5
	Penata Laporan Keuangan	S1. Akuntansi	2
	Penyusun Hubungan Antar Lembaga	S1. Publik Relation	2

	Penyiap laporan dan program	DIII Akuntansi	4
	Operator Komputer	DIII Teknik Komputer	3
	Pembimbing Mental Pegawai	S1. Psikologi	4
	Penata Laporan Keuangan	S1. Akuntansi	2
	Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program	S1. Ekonomi Manajemen	6
	Penterjemah	S1. Sastra Inggris	2
	Teknisi Mesin	SMK Mesin	3
	Teknisi Listrik	SMK Listrik	3
3	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL		
	JUMLAH		23
	Perancang Peraturan Perundang-undangan	S1. Ilmu Hukum	3
	Pengkaji Hukum	S1. Ilmu Hukum	2
	Penyusun Rencana Pengembangan dan Pembinaan	S1. Ekonomi Manajemen	2
	Penyusun Bahan Kerjasama Teknik Luar Negeri	S1. Hubungan Internasional	1
	Penyusun Bahan Evaluasi dan Laporan	S1. Akuntansi	2
	Pengelola Administrasi	S1. Administrasi Negara	2
	Pranata Komputer	S1. Teknik Komputer	3
	Operator Komputer	DIII Teknik Komputer	3
	Teknisi Mesin	SMK Mesin	5
4	DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		
	JUMLAH		42
	Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum	S1. Ilmu Hukum	3
	Penyusun Bahan Kerjasama Teknik Luar Negeri	S1. Hubungan Internasional	2
	Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program	S1. Ekonomi Manajemen	2
	Penyusun Bahan Evaluasi dan Laporan	S1. Akuntansi	5
	Pemeriksa Paten	DIII. Teknik Komputer	3
	Pemeriksa Merek	S1. Desain Produk atau Seni Rupa	2
	Pemeriksa Desain Industri	S1. Teknik Kimia atau Pertambangan	2
	Penterjemah Bahasa Jepang	S1. Sastra Jepang	2
	Penterjemah Bahasa Inggris	S1. Sastra Inggris	2
	Penterjemah Bahasa Cina	S1. Sastra Cina	2
	Pemeriksa Merek	S1. Teknik Elektro	2
	Pemeriksa Merek	S1. Design Grafis	2
	Pemeriksa Merek	S1. Teknik Mesin	2
	Pemeriksa Merek	S1. Teknik Industri	2
	Pemeriksa Merek	S1. Humas dan Broadcasting	2
	Pemeriksa Merek	DIII Analisis Laboratorium	2
	Pengadministrasi Umum	DIII Adm Perkantoran, Sekretaris	3
	Teknisi Listrik	SMK Listrik	2
5	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM		
	JUMLAH		53
	Perancang Peraturan Perundang-undangan	S1. Ilmu Hukum	5
	Perancang Peraturan Perundang-undangan	S1. Hukum Tata Negara	4
	Analisis Politik Hukum	S1. Ilmu Politik	4
	Analisis Hukum Perdata/Pidana	S1. Hukum Perdata atau Pidana	6
	Penyusun Bahan Kerjasama Teknik Luar Negeri	S1. Hubungan Internasional	3
	Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program	S1. Ekonomi Manajemen	5
	Agendaris	DIII Adm Perkantoran, Sekretaris	5

	Penyusun Bahan Administrasi Kewarganegaraan	S1. Administrasi Negara	3
	Penata Laporan Keuangan	S1. Akuntansi	2
	Pranata Komputer	S1. Teknik Komputer	8
	Verifikator Keuangan	DIII. Akuntansi	3
	Penterjemah	DIII. Sastra Belanda	1
	Operator Komputer	DIII. Teknik Komputer	2
	Teknisi Listrik	SMK Listrik	2
6	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN		
	JUMLAH		29
	Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program	S1. Ekonomi Manajemen	4
	Penelaah Peraturan Perundang-undangan	S1. Ilmu Hukum	3
	Penyusun Pemberian Remisi Hukuman	S1. Administrasi Negara	2
	Penata Laporan Keuangan	S1. Akuntansi	3
	Penyusun Bahan Kerjasama Teknik Luar Negeri	S1. Hubungan Internasional	2
	Pranata Komputer	S1. Teknik Komputer	3
	Penyuluh Pembina Mental Napi	S1. Sarjana Agama Islam Syariah	2
	Pembimbing Kemasyarakatan	S1. Psikologi atau Kriminologi	4
	Agendaris	DIII. Adm Perkantoran atau Sekretaris	2
	Operator Komputer	DIII. Teknik Komputer	4
7	DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		
	JUMLAH		9
	Perancang Peraturan Perundang-undangan	S1. Hukum Islam	2
	Penata Laporan Keuangan	S1. Akuntansi	2
	Pranata Komputer	S1. Teknik Komputer	1
	Operator Komputer	DIII. Grafika	2
	Agendaris	DIII. Adm Perkantoran atau Sekretaris	2
8	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI		
	JUMLAH		47
	Penyusun Bahan Kerjasama Teknik Luar Negeri	S1. Hubungan Internasional	2
	Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program	S1. Ekonomi Manajemen	3
	Pengadministrasi Umum	S1. Administrasi Negara	3
	Penata Laporan Keuangan	S1. Akuntansi	8
	Pranata Komputer	S1. Teknik Komputer	3
	Penterjemah Bahasa Inggris	S1. Sastra Inggris	3
	Penyusun Hubungan Antar Lembaga	S1. Publik Relation	3
	Pengkaji Hukum	S1. Ilmu Hukum	3
	Penterjemah Bahasa Cina	S1. Sastra Cina	3
	Penterjemah Bahasa Jepang	S1. Sastra Jepang	3
	Penterjemah Bahasa Cina	DIII. Sastra Cina	2
	Agendaris	DIII. Adm Perkantoran atau Sekretaris	3
	Operator Komputer	DIII. Teknik Komputer	4
	Perawat	DIII. Perawat	1
	Teknisi Mesin	SMK Mesin	3
9	DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA		
	JUMLAH		13
	Penyusun Bahan Kerjasama Teknik Luar Negeri	S1. Komunikasi	3
	Penata Laporan Keuangan	S1. Akuntansi	2

	Pranata Komputer	S1. Teknik Komputer	3
	Penyiap laporan dan program	DIII. Akuntansi atau Manajemen	3
	Agendaris	DIII. Adm Perkantoran atau Sekretaris	2
10	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM		
	JUMLAH		11
	Penelaah Hukum	S1. Ilmu Hukum	1
	Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program	S1. Ekonomi Manajemen	1
	Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum	S1. Ilmu Hukum	2
	Penata Laporan Keuangan	S1. Akuntansi	2
	Operator Komputer	DIII. Teknik Komputer	3
	Agendaris	DIII. Adm Perkantoran atau Sekretaris	2
11	INSPEKTORAT JENDERAL		
	JUMLAH		17
	Penyusun Bahan Evaluasi Rencana dan Program	S1. Ekonomi Manajemen	2
	Penata Laporan Keuangan	S1. Akuntansi	2
	Calon Auditor	S1. Ilmu Hukum	5
	Operator Komputer	DIII. Teknik Komputer	6
	Agendaris	DIII. Adm Perkantoran atau Sekretaris	2

- Untuk pelamar pusat yang telah mendaftar melalui website <http://www.depkumham.go.id> dan <http://e-cpns.depkumham.go.id> kemudian mengirim berkas lamaran lengkap dengan melampirkan tanda bukti registrasi dari website melalui PO BOX 1864 JKP 10018, stempel pos kilat khusus paling lambat tanggal 5 Oktober 2009.
- Pengumuman hasil seleksi Administrasi dapat dilihat melalui website <http://www.depkumham.go.id> dan <http://e-cpns.depkumham.go.id> tanggal 13 Oktober 2009.
- Pada saat pengambilan nomor ujian menunjukkan Ijazah Asli, Transkrip Nilai Asli, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Asli, Kartu Kuning/Kartu Pencari Kerja Asli, serta Akta kelahiran/Kenal Lahir Asli.

UNIT KANTOR WILAYAH

Untuk Pelamar CPNS Daerah (Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM di Seluruh Indonesia), Nama Jabatan, Jumlah Lowongan dan Kualifikasi Pendidikan dapat dilihat di papan pengumuman masing-masing Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM di Seluruh Indonesia.

Jakarta, 17 September 2009
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
Selaku Ketua Pelaksana

ttd

Drs. M. Amar Cho, SH.,M.Si
NIP. 19510407 197603 1 001